

# Covid-19 di DIY Tinggi, Epidemiolog Minta Pemda Tegas Implementasikan PPKM Darurat

Wednesday, 14 Juli 2021 WIB, Oleh: Ika

---



Kasus positif Covid-19 di DIY terus melonjak. Meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali telah berlangsung 12 hari per 14 Juli 2021, kasus harian di DIY masih sangat tinggi.

Data Dinas Kesehatan DIY mencatat kasus positif Covid-19 per 13 Juli 2021 mencapai 2.731 kasus sekaligus tertinggi selama pandemi. Sementara kasus sembuh mencapai 843 orang dan kematian bertambah 39 orang. Dengan demikian, kasus aktif di seluruh DIY hingga saat ini menjadi 21.387.

Menanggapi hal tersebut Epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad, M.Ph., Ph.D., meminta Pemda DIY tegas dalam menerapkan PPKM Darurat. Dengan implementasi secara serius dan tegas di lapangan, PPKM Darurat diharapkan bisa berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan menurunkan lonjakan kasus Covid-19 di DIY serta berkontribusi dalam menekan angka Covid-19 nasional.

“Tujuan PPKM kan menurunkan mobilitas. Jadi, penerapannya harus tegas, pembatasan mobilitas harus ketat, tapi saat ini implementasinya tidak cukup kuat menekan mobilitas,” terangnya, Rabu (14/7)

Ia menyampaikan penurunan mobilitas masyarakat DIY selama pemberlakuan PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021 belum signifikan. Dengan kata lain angka penurunan mobilitas masyarakat DIY masih rendah.

“Dari Google Traffic, sebelum PPKM yang tinggal di rumah ada sebanyak 15%, lalu saat PPKM

meningkat jadi 20%. Dengan begitu hanya ada penambahan 5% saja dan angka ini tidak cukup untuk menekan penularan Covid-19. Setidaknya perlu 70% dari populasi membatasi mobilitas baru punya dampak besar,"paparnya.

Kondisi tersebut menunjukkan implementasi PPKM Darurat di lapangan belum cukup kuat. Menurutnya, penerapan PPKM Darurat tidak hanya sebatas menutup akses lalu lintas/ jalan untuk menghentikan mobilitas. Namun, perlu ada rekayasa sosial agar masyarakat bisa patuh menjalankan protokol kesehatan khususnya terkait membatasi mobilitas. Beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti penindakan hukum yang tegas bagi pelanggarnya, pemberian bantuan hidup baik menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) maupun dana desa, dan lainnya.

"Tidak hanya butuh kebijakan, pemerintah harus memobilisasi hal itu secara aktif," katanya.

Kondisi kasus Covid-19 di DIY bisa dibilang tidak main-main. Bahkan, Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam sejumlah pemberitaan mengatakan DIY menjadi salah satu provinsi di Indonesia, selain Jakarta, yang mengalami dampak paling berat jika lonjakan kasus Covid-19 terus saja terjadi.

Penambahan kasus baru yang tinggi setiap harinya membuat Bed Occupancy Rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan DIY masih di atas angka 90%. Saat ini, BOR rumah sakit rujukan DIY tercatat penuh di angka 99,56% atau 1.369 dari 1.375 tempat tidur.

Riris menyebutkan penambahan kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurai persoalan tersebut. Kendati begitu, upaya tersebut perlu tetap dibarengi dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Sebab, seberapa banyak penambahan kapasitas rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat ataupun selter tidak akan berjalan optimal jika penularan masih terus terjadi dalam jumlah yang tinggi.

"Mau ditambah seberapapun, kalau penularannya masih terjadi maka suatu saat akan tidak mampu lagi menampung. Tetap mobilitas harus diperketat," tegasnya.

Penulis: Ika

---

## **Berita Terkait**

- [Epidemiolog UGM: PPKM Darurat Belum Efektif Turunkan Kasus Covid-19](#)
- [Epidemiolog UGM: PPKM II Akan Efektif Jika Lebih Ketat](#)
- [Epidemiolog: Dukung Pengendalian Covid dengan Mematuhi PPKM](#)
- [Mulai PTM, Epidemiolog UGM Minta Warga Sekolah Tetap Disiplin Prokes](#)
- [Implementasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat Harus Tegas](#)